

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di masa globalisasi dan modernitas saat ini, peningkatan mutu pendidikan kiranya menjadi masalah yang urgen. Peningkatan mutu pendidikan diperlukan dalam pengelolaan organisasi pendidikan agar bergerak menuju satu arah. Pendidikan yang baik dan bermutu menjadi dasar pengembangan dan kemajuan selanjutnya. Oleh karena itu, pengelola pendidikan harus merespon berbagai kebijakan pemerintah dan keinginan masyarakat dalam rangka perbaikan mutu dengan kreatifitas, inovasi yang tinggi, dan strategi manajemen yang baik. Dengan demikian akan tercipta pendidikan yang lebih baik dan maju untuk bersaing di tingkat regional, nasional dan global.

Perubahan dalam peranan dan fungsi madrasah dari yang statis di jaman lampau kepada yang dinamis dan fungsional konstruktif di era globalisasi, membawa tanggung jawab yang lebih luas kepada madrasah, khususnya kepada administrator madrasah. Pada mereka harus tersedia pengetahuan yang cukup tentang kebutuhan nyata masyarakat serta kesediaan dan keterampilan untuk mempelajari secara kontinyu perubahan yang sedang terjadi di masyarakat sehingga madrasah melalui program – program pendidikan yang disajikannya dapat senantiasa menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru dan kondisi baru.

Perubahan ini seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, sehingga terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan pendidikan yang antara lain telah memunculkan suatu model dalam manajemen pendidikan, yaitu *school based management*. Model manajemen ini pada dasarnya memberikan peluang yang sangat besar (otonomi) kepada madrasah untuk mengelola dirinya sesuai dengan kondisi yang ada serta memberikan

kesempatan kepada masyarakat (stakeholders) untuk ikut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.¹

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah melalui penerapan Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah. Penerapan MBM ini telah ditetapkan dalam UU sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 Pasal 51 yang berbunyi Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

Konsep MBS/M dipilih didasarkan pada paradigma desentralisasi pendidikan yang diterapkan untuk memecahkan ketidak efektifan dari paradigma pendidikan sentralistik yang sebelumnya diterapkan di Indonesia. Manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih ke sekolah–sekolah dan meningkatkan keterlibatan langsung dari komunitas sekolah (Kepala sekolah, guru, staf, orang tua dan masyarakat) dalam pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah di bawah kebijakan Departemen Pendidikan Nasional.

Seiring dengan bergulirnya reformasi di negara ini, telah membawa perubahan–perubahan mendasar dalam berbagai lingkungan, termasuk lingkungan pendidikan. Perubahan–perubahan tersebut menurut Ranu Sudarmono diantaranya adalah :

Pemberian otonomi luas kepada setiap daerah dalam menyelenggarakan seluruh bidang kehidupan kecuali politik luar negeri, keamanan, peradilan, moneter, dan fisika, agama serta bidang yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Salah satu aspek yang ikut terkait dengan diberlakukannya otonomi daerah adalah perubahan paradigma dalam pengelolaan pendidikan yang antara lain telah memunculkan salah satu model dalam

¹ E.Mulyasa, *Manajemen Berbasis Madrasah : Konsep, Strategi dan Implementasi* (Bandung : PT.Raja Grafindo Persada, 2009), 11

manajemen pendidikan, yaitu “*School Based Management*” (SBM) yang kemudian diterjemahkan menjadi Manajemen Berbasis Madrasah (MBM).²

Sementara rumusan Bappenas menyatakan bahwa MBM atau SBM adalah upaya konkret otonomi madrasah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui; antara lain : Keleluasan Mengelola sumber daya, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Sedangkan peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain melalui kontrol dan partisipasi orang tua terhadap madrasah, fleksibilitas pengelolaan madrasah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan madrasah.³

Sedangkan Departemen Pendidikan Nasional mengartikan MBS sebagai manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada madrasah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga madrasah untuk meningkatkan mutu madrasah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.⁴

Penyerahan otonomi dalam pengelolaan madrasah ini diberikan tidak lain dan tidak bukan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Dengan kata lain melalui desentralisasi dihaapkan permasalahan pokok pendidikan yaitu mutu, pemerataan, relevansi dan efisiensi dapat terpecahkan. Nurkholis mengatakan :

“bahwa berbagai studi tentang desentralisasi menunjukkan bahwa pekerjaan yang bersifat kompleks, dikerjakan dalam tim, mengandung unsur ketidak pastian dan berada dalam lingkungan yang cepat berubah dan tidak dapat dikelola secara sentralistik”.⁵

Pemberdayaan madrasah dengan memberikan otonomi yang lebih besar tersebut menurut Faisal Jalal di samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan

²Ranu Sudarmono, [http://jurnal/manajemen-pendidikan-manajemen-berbasis-madrasah/2008/3/13/Manajemen Berbasis Madrasah](http://jurnal/manajemen-pendidikan-manajemen-berbasis-madrasah/2008/3/13/Manajemen%20Berbasis%20Madrasah) di akses 14 Mei 2020

³ Abdul Wahid, *Manajemen Berbasis Madrasah; Ihtiar menuju madrasah yang Mandiri*, dalam *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Ed.I (Yogyakarta;Pustaka Pelajar 2002), 266.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Madrasah Lanjutan Tingkat Pertama, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah-Buku 1* (Depdiknas Jakarta, 2001),15.

⁵ Nurkholis, *Manajemen Berbasis Madrasah; Teori, Model dan Aplikasi* (Jakarta: Grasindo, 2003), 40.

masyarakat. Juga dapat dipakai sebagai sarana peningkatan efisiensi pendidikan (*Improving school efficiency*). Argumentasinya ialah, krisis ekonomi yang melanda Indonesia berdampak luas terhadap pendidikan terutama pada dua segi; pertama mengurangi kemampuan pemerintah menyediakan dana yang cukup untuk pendidikan dan kedua, menurunkan kemampuan orang tua dalam pembiayaan pendidikan anaknya. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan madrasah, maka beban pemerintah dapat berkurang. Di samping itu, berkurangnya liku-liku birokrasi dalam prinsip desentralisasi juga mendukung efisiensi madrasah. Mengikutsertakan kepala madrasah dan guru dalam pengambilan keputusan-keputusan madrasah dapat mendorong rasa kepedulian yang tinggi dari warga madrasah terhadap madrasah. Hal ini pada akhirnya mendorong mereka untuk menggunakan sumber daya yang ada secara efisien untuk mencapai hasil optimal.⁶

Oleh karena tujuan dari MBS/M yang diharapkan oleh pemerintah secara umum adalah untuk memandirikan atau membudayakan madrasah melalui pengambilan keputusan secara partisipatoris. Lebih spesifik Abdul Wahid menyebutkan bahwa: Tujuan MBM adalah (1) Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif madrasah dalam mengelola dan membudayakan sumber daya yang tersedia, (2) meningkatkan kepedulian warga madrasah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui keputusan bersama. (3) Meningkatkan tanggung jawab madrasah pada orang tua, masyarakat, pemerintah, tentang mutu pendidikan madrasah. Dan (4) meningkatkan kompetisi yang sehat antar madrasah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.⁷

Berdasarkan tujuan di atas diketahui bahwa penerapan demokrasi pendidikan ini, menuntut masing-masing lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan,

⁶ Faisal Jalal dkk, *Reformasi Pendidikan dalam konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta; Adi Cita, 2001), 152.

⁷ Abdul Wahid, *Manajemen Berbasis Madrasah; Ikhtiar Menuju Madrasah yang Mandiri*, dalam *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Ed. I (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2002), 265.

meningkatkan kepedulian warga madrasah, meningkatkan tanggung jawab madrasah kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah serta meningkatkan kompetisi yang sehat antar madrasah. Disisi lain masing –masing lembaga pendidikan ditantang dan dihadapkan dengan berbagai masalah dan tuntutan seiring perkembangan di segala bidang.

Untuk itulah sekolah / madrasah diberikan otonomi yang lebih besar dalam kewenangan dan pengelolaan dengan menerapkan keputusan partisipatif dalam meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Dengan demikian diharapkan demokrasi pendidikan di madrasah mengarah pada pemberdayaan dan kemandirian madrasah. Disamping itu diharapkan adanya pemberdayaan yang tinggi dari potensi masyarakat dan orang tua, baik melalui perencanaan tarjet mutu, pedoman dan monitoring, masukan dan pertimbangan dalam mewujudkan mutu pendidikan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis Depdiknas diketahui bahwa secara umum kualitas pelaksanaan MBS di sekolah masih rendah walaupun telah dilaksanakan Manajemen berbasis sekolah yang ditawarkan pemerintah. Oleh karena itu rendahnya mutu pendidikan menurut Depdiknas disebabkan oleh tiga faktor yaitu :

Faktor pertama ; kebijakan dan penyelenggara pendidikan nasional. Menggunakan pendekatan *Education Production Function* input-ouput analysis yang tidak dilaksanakan secara konsekwen.

Faktor Kedua ; Penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik, Sehingga menempatkan madrasah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi madrasah setempat. Faktor Ketiga; Peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya lebih banyak

bersifat dukungan dana dan bukan pada proses pendidikan yaitu memonitoring, pengambilan keputusan, evaluasi dan akuntabilitas.⁸

Berdasarkan ketiga faktor tersebut dan pengalaman penulis sebagai guru diketahui bahwa memang secara umum kualitas implementasi MBM di Madrasah masih rendah. Beberapa fenomena yang menunjukkan diantaranya masih banyak Kepala Madrasah yang selalu meminta restu atau petunjuk dari atasan yaitu Kementerian Agama dalam rangka merumuskan kebijakan, namun di pihak lain ada kepala madrasah yang telah sukses mengaplikasikan konsep Manajemen Berbasis Madrasah dengan keberanian mengambil keputusan atas inisiatif sendiri bersama dengan guru dan pegawai tata usaha madrasah.

Selain faktor manajemen, kemajuan madrasah sangat tergantung pada sosok pemimpinnya, yakni Kepala Madrasah, sebab kepala madrasahlah yang berada di garda depan untuk menggerakkan dan menetapkan target madrasah. Keputusan-keputusan penting yang berdampak besar bagi madrasah terlahir darinya. Maka eksistensi, fungsi dan peran kepala madrasah sangat penting untuk dikaji, dirumuskan, dan dikembangkan guna memenuhi harapan publik akan terwujudnya lembaga pendidikan yang berkualitas. Profesionalitas kepala madrasah menjadi syarat mutlak terwujudnya madrasah yang berdaya saing tinggi. Apabila Kepala Madrasah bersifat pasif, apatis, dan miskin ide, maka madrasah akan mengalami kemunduran drastis.

Kepala Madrasah merupakan pemimpin pada madrasah, MI/MTs/MA yang kehadirannya dapat dipilih secara langsung, ditetapkan oleh Yayasan atau ditetapkan oleh Kementerian Agama. Pengertian tersebut sesuai dengan pendapat Sudarwan Danim dalam Jamal Ma'ruf Asmani, bahwa Kepala Madrasah adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Madrasah. Selain itu Wahjo Sumidjo mengemukakan bahwa kepala

⁸Depdiknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah*, Buku IV Perintisan Program Dirjen Dinkesmen (Jakarta ; Depdiknas,2000)4-5.

Madrasah adalah tenaga-tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah, tempat diselenggarakannya proses belajar mengajar atau terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan siswa yang menerima pelajaran.⁹

Pihak sekolah dalam menggapai tujuan yang telah ditetapkan perlu di tunjang oleh kemampuan kepala madrasah dalam menjalankan roda kepemimpinannya. Meskipun pengangkatan kepala madrasah tidak dilakukan secara sembarangan, bahkan diangkat dari guru yang sudah berpengalaman atau mungkin sudah lama menjabat sebagai wakil kepala sekolah, namun tidak dengan sendirinya membuat kepala madrasah menjadi profesional dalam melakukan tugasnya.berbagai kasus banyak kepala madrasah yang berpaku dengan urusan-urusan administrasi, yang sebenarnya dapat dilimpahkan kepada tenaga administrasi. Dalam pelaksanaannya, pekerja kepala madrasah merupakan pekerjaan berat yang menuntut kemampuan ekstra.¹⁰

Dinas Pendidikan telah menetapkan bahwa kepala sekolah harus mampu melaksanakan pekerjaannya sebagai edukator, manajer, administrator, dan supervisor (EMAS). Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, kepala sekolah harus mampu berperan sebagai leader, innovator dan motivator (EMASLIM).¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Madrasah dan waka pengembangan mutu, disimpulkan bahwa Madrasah Tsanawiyah Badril Huda Besuki Situbondo telah menerapkan konsep Manajemen berbasis Madrasah dengan keberanian mengambil keputusan atas inisiatif bersama dengan guru, pegawai tata usaha dan komite madrasah untuk merencanakan berbagai program baru dalam rangka memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan madrasah,¹²

⁹ Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Menjadi Kepala Sekolah Profesional*(Jogjakarta; Diva Press, 2012), 18-19

¹⁰E Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional* (Bandung ; Remaja Rosdakarya,2011),97.

¹¹ Mulyasa,98

¹² Hasil wawancara dengan kepala madrasah dan waka peningkatan mutu, tanggal 26 Desember 2019.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan konteks penelitian, Realitas yang terjadi di MTs Badril Huda Jetis Besuki maka secara umum penelitian ini membahas masalah peran kepala madrasah dalam implementasi Manajemen Berbasis Madrasah di MTs Badril Huda Jetis Besuki, yang kemudian dijabarkan dalam fokus penelitian sebagai :

1. Bagaimana peran Kepala Madrasah dalam perencanaan Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah di MTs Badril Huda Jetis Besuki;
2. Bagaimana Peran Kepala Madrasah dalam Pengorganisasian Implementasi Manajemen berbasis Madrasah di MTs Badril Huda Jetis Besuki;
3. Bagaimana Peran Kepala Madrasah dalam penggerakan Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah di MTs Badril Huda Jetis Besuki;
4. Bagaimana Peran Kepala Madrasah dalam pengawasan Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah di MTs. Badril Huda Jetis Besuki.

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari Fokus Penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan :

1. Peran Kepala Madrasah dalam perencanaan implementasi Manajemen berbasis madrasah di MTs Badril Huda Jetis Besuki;
2. Peran Kepala Madrasah dalam pengorganisasian implementasi manajemen berbasis madrasah di MTs Badril Huda Jetis Besuki;
3. Peran Kepala Madrasah dalam penggerakan implementasi manajemen berbasis madrasah di MTs Badril Huda Jetis Besuki;
4. Peran Kepala Madrasah dalam pengawasan implementasi Manajemen Berbasis Madrasah di MTs. Badril Huda Jetis Besuki.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi :

1. Pengembangan ilmu .

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmu manajemen pendidikan pada khususnya dalam bidang manajemen berbasis madrasah dalam bentuk penajaman konsep serta aspek-aspek lain yang berkaitan.

2. Peneliti,

Langkah awal untuk mengasah kemampuan dalam melakukan kajian ilmiah.

3. MTs Badril Huda Besuki,

Sebagai referensi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan mutu, program perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan madrasah, dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga di meferensi dalam rangka masa yang akan datang.

4. Bagi IKHAC Pacet Mojokerto

Sebagai bahan informasi untuk memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya bidang Manajemen pendidikan lebih spesifik lagi Manajemen Berbasis Madrasah sebagai suatu disiplin ilmu pada umumnya dan pada khususnya pada Institut Agama Islam KH. Abdul Chalim (IKHAC) Pacet Mojokerto.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini mengenai peran Kepala Madrasah dalam implementasi Manajemen Berbasis Madrasah di MTs Badril Huda yang terkait dengan penelitian ini adalah :

1. Siti Haini Musyarofah yang berjudul “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Bidang Tenaga Pendidik (studi kasus di MA Abdul Aziz Curahlele Balung Jember Tahun 2009/2010.”¹³

Penelitian ini membahas tentang Menejemen Berbasis madrasah dibidangt enaga pendidik saja yang terfokus pada perencanaan, pengadaan, pembinaan dan implementasi serta penilaian guru. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari peneltian ini adalah MA. Abdul Azis Curah Balung Jember telah melaksanakan menejemen sekolah secara umm dalam kurikulum dan pembelajaran, kesiswaan, sarana dan prasarana serta humas. Namun dalam konteks yang berbeda, menejemen dibidang tenaga pendidik belum berjalan secara optimal dan tidak efektif terutama dalam perencanaan pengadaan guru.

Dalam perencanaan pengadaan guru di MA Abdul Azis terdapat problem serius karena adanya kebijakan ketua pondok dan kurikulum pondok yang tidak sama dengan kurikulum dan kebijakan madrasah sehngga rencana kerja madrasah tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Muhammad Ismail yang berjudul Perencanaan MA Madrasah Presfektif Menejemen Berbasis Madarasah di Madrasah Aliyah Negeri Rasah dalam perspektif manajemen Berbasis Madrasah di MIMA 29 Miftahul Ulum Ambulu.¹⁴

Tinjauannya dibatasi pada analisis SWOT rencana kerja madrasah, proses penyusunannya dan penetapannya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

¹³Siti Haini Musyarofah, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di bidang tenaga pendidik (Studi Kasus di MA Abdul Azizi Curahlele Balung Tahun 2009/2010) Jember* “ Tesis STAIN Jember,2010, Tidak di terbitkan)

¹⁴ Muhammad Ismail, *Perencanaan Madrasah dalam Perspektif Manajemen Berbasis Madrasah di MIMA 29 Miftahul Ulum Ambulu* (Jember : Tesis , STAIN Jember,2012, tidak diterbitkan)

Adapun hasil penelitian ini adalah seluruh kegiatan perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan semua warga madrasah. Sedangkan hasil ketetapan dievaluasi seluruh warga sekolah dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang.

3. Lailatul Usriyah yang berjudul peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu urusan di Mi Darul Huda Kesilir Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi tahun pelajaran 2011-2012.¹⁵

Penelitian ini mengkaji tentang peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu lulusan. Fokus penelitian ini tentang peran kepala sekolah sebagai konseptor, manajer, administrator dan superfisor. Pendekatan yang disunahkan adalah pendekatan kualitatif.

Adapun hasil dalam penelitian ini adalah dalam meningkatkan mutu lulusan di MI Durul Huda Kesilir Siliragung Kabubapten Banyuangi, kepala madrasah dapat berperan dan berfungsi dengan baik khususnya sebagai administrator, manajer, konseptor dan sebagai supervisor.

Ketiga penelitian terdahulu diatas secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Tabel Orisinalitas Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Pendekatan	Hasil Penelitian
1	Siti Haini Musyarrofah, 2010, Tesis STAIN Jember	Implementasi Manejeman Berbasih Madrasah di Bidang tenaga Pendidik (Studi kasus di MA Nurul Azizi Balung	Pendekatan kualitatif	Ma Nurul Azizi telah melaksankn manajemen secara umum, tetapi manajemen dibidang tenaga pendidik belum berjalan secara optimal dan tidak efektif

2	Muhammad Ismail, 2012 Tesis STAIN Jember	Perencanaan Madrasah dalam Perspektif manajemen berbasis madrasah di MIMA 29 Miftahul Ulum Ambulu	Pendekatan Kualitatif	Seluruh kegiatan perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan semua warga madrasah
3	Lailatul Usriyah, 2012, Tesis STAIN Jember	Peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu lulusan di MI Darul Huda Kesilir Siliragung kabupaten Banyuwangi tahun pelajaran 2011/2012	Pendekatan kualitatif	Kepala MI Darul Huda berperan dan berfungsi dengan baik khususnya sebagai administrator Manajer konseptor dan sebagai supervisor

Persamaan penelitian pertama dan kedua dengan penelitian ini adalah sama – sama meneliti tentang Manajemen Berbasis madrasah (MBM). Adapun penelitian ketiga sama – sama meneliti tentang peran kepala madrasah.

Perbedaan ketiga penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini adalah terletak pada obyek dan fokus penelitiannya. Penelitian ini mengambil obyek pada Madrasah Tsanawiyah Badril Huda Besuki Situbondo sebagai lokasi penelitian dan terfokus pada peran kepala madrasah dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan implementasi Manajemen Berbasis Madrasah di Madrasah tsanawiyah Badril Huda Besuki Situbondo.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan pengertian istilah – istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian.¹⁶ Definisi istilah sangat berguna untuk

¹⁶PPs.STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Pascasarjana* (Jember,PPs.STAIN jember,2012),15.

memberikan pemahaman dan batasan yang jelas agar penelitian ini tetap terfokus pada kajian yang diinginkan peneliti. Adapun istilah – istilah yang perlu didefinisikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran Kepala Madrasah adalah perilaku yang diharapkan dari seorang pemimpin suatu lembaga pendidikan atau kepala madrasah dalam melaksanakannya kewajibannya dalam pelaksanaan MBM di MTs Badril Huda Jetis Besuki Situbondo.
2. Manajemen Berbasis Madrasah merupakan model pengelolaan yang memberikan peluang sangat besar terhadap otonomi sekolah / Madrasah untuk mengelola dirinya sesuai dengan kondisi yang ada serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. dalam penelitian ini manajemen berbasis Sekolah (MBS) dan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) mempunyai pengertian yang sama.
3. Peran Kepala Madrasah dalam implementasi Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) berarti perilaku yang diharapkan dari seorang kepala madrasah menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang melibatkan semua stekholder madrasah. Fungsi-fungsi manajemen yang di maksud dalam penelitian ini adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.